



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL FATAH**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **33177**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.284.060.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/50 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 141.840.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/140 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 348.960.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 141.840.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 831.420.000
5. Tanah Seluas 7780 m2 di BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 390 m2 di BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 41200 m2 di BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 204.517.500**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 189.667.500
3. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 9.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 236.175.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	363.432.444
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.088.184.944
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.088.184.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.